

# Implementasi Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung

Disusun Oleh :

Alfiatus Fadjar Kurnaini (222020100185)

Dosen Pembimbing :

Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

**Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

# Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam konteks pembangunan nasional, desa menjadi basis utama pembangunan sehingga diperlukan sistem pendataan dan pemantauan yang mampu menggambarkan kondisi pembangunan desa secara akurat, objektif, dan berkelanjutan.

## Indeks Desa sebagai Instrumen Pembangunan

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembangunan desa, pemerintah menetapkan Indeks Desa melalui Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024. Indeks Desa merupakan aplikasi pengukuran tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, serta penentuan intervensi pembangunan dengan menghadirkan 6 dimensi meliputi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Indeks Desa juga menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan cakupan penilaian yang lebih komprehensif.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Status Desa	Nilai Indeks Desa	Jumlah Desa
Mandiri	$79,63\% \leq ID \leq 100\%$	20,503
Maju	$69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$	23,579
Berkembang	$57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$	21,813
Tertinggal	$49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$	4,672
Sangat Tertinggal	$0\% \leq ID \leq 49,48\%$	4,694
Tidak Memenuhi Kriteria	-	4

Sumber: Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 343

# Pendahuluan

**Tabel 2.** Capaian Dimensi Indeks Desa Keper

Dimensi	Sub Dimensi	Capaian	Target	Keterangan
Layanan Dasar	Pendidikan; Kesehatan; dan Utilitas Dasar	23.15%	26.77%	APM PAUD & SMA rendah, kepesertaan BPJS minim.
Sosial	Aktivitas; Fasilitas Masyarakat	11.97%	13.39%	Tidak adanya ruang publik dan frekuensi gotong royong yang rendah.
Ekonomi	Produksi Desa; Fasilitas; dan Pendukung Ekonomi	23,056	25.20%	Tidak adanya pasar desa, kegiatan ekonomi kreatif, dan layanan keuangan resmi.
Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan; dan Penanggulangan	11.65%	14.17%	Tidak ada pengolahan/pemanfaatan sampah & EBT.
Akseibilitas	Kondisi Akses Jalan; dan Kemudahan Akses Jalan.	7.71%	7.87%	Permasalahan kecil pada angkutan perdesaan.
Tata Kelola Pemerintah Desa	Kelembagaan dan Pelayanan Desa; dan Tata Kelola Keuangan Desa	9.77%	12.60%	Tidak mencapai target karena musyawarah desa minim dan PADes menurun.
<b>Total Nilai Indeks Desa</b>		<b>83.17%</b>	<b>100.00%</b>	

Berdasarkan hasil pengukuran, Desa Keper memperoleh nilai Indeks Desa sebesar 83,17% dan diklasifikasikan sebagai desa mandiri. Dalam pelaksanaannya, implementasi Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan sehingga pengelolaan aplikasi dijalankan oleh Kasi Pelayanan sebagai operator desa. Perubahan sistem dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) juga menuntut penyesuaian pada dimensi, indikator, serta mekanisme pengisian data yang lebih kompleks. Selain itu, pemahaman penggunaan sistem sebagian diperoleh secara mandiri karena bimbingan teknis masih terbatas, serta terdapat kondisi teknis pada aplikasi seperti data dan skor yang tidak dapat ditampilkan kembali setelah verifikasi serta akses sistem yang melambat ketika mendekati batas waktu pengisian data.

Sumber: Diolah dari Indeks Desa Keper.

# Pendahuluan

**Putri dan Agustina, (2025)**

“Implementasi Permendes PDPTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan”.

**Indriani, (2025)**

“Implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang”.

**Maharani et. al, (2025)**

“Implementasi Aplikasi BUMDes-KU Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerta Sari Utama Desa Kesiman Kertalangu”.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas implementasi sistem berbasis e-government di tingkat desa, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan Indeks Desa pasca perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Charles O Jones. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keber, Kecamatan Krembung.

# Pernyataan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana implementasi aplikasi Indeks Desa berbasis web dalam kegiatan pendataan dan pemantauan pembangunan di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?

# Metode

01

## Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

02

## Fokus Penelitian

Analisis Implementasi Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung

03

## Teori Implementasi

Charles O. Jones  
1. Organisasi  
2. Interpretasi  
3. Aplikasi

04

## Lokasi Penelitian

Teknik purposive sampling, yaitu Kasi Pelayanan dan Bendahara Desa Keper.

05

## Teknik pengumpulan data

1. Observasi, 2. wawancara, 3. dokumentasi.

06

## Analisis Data

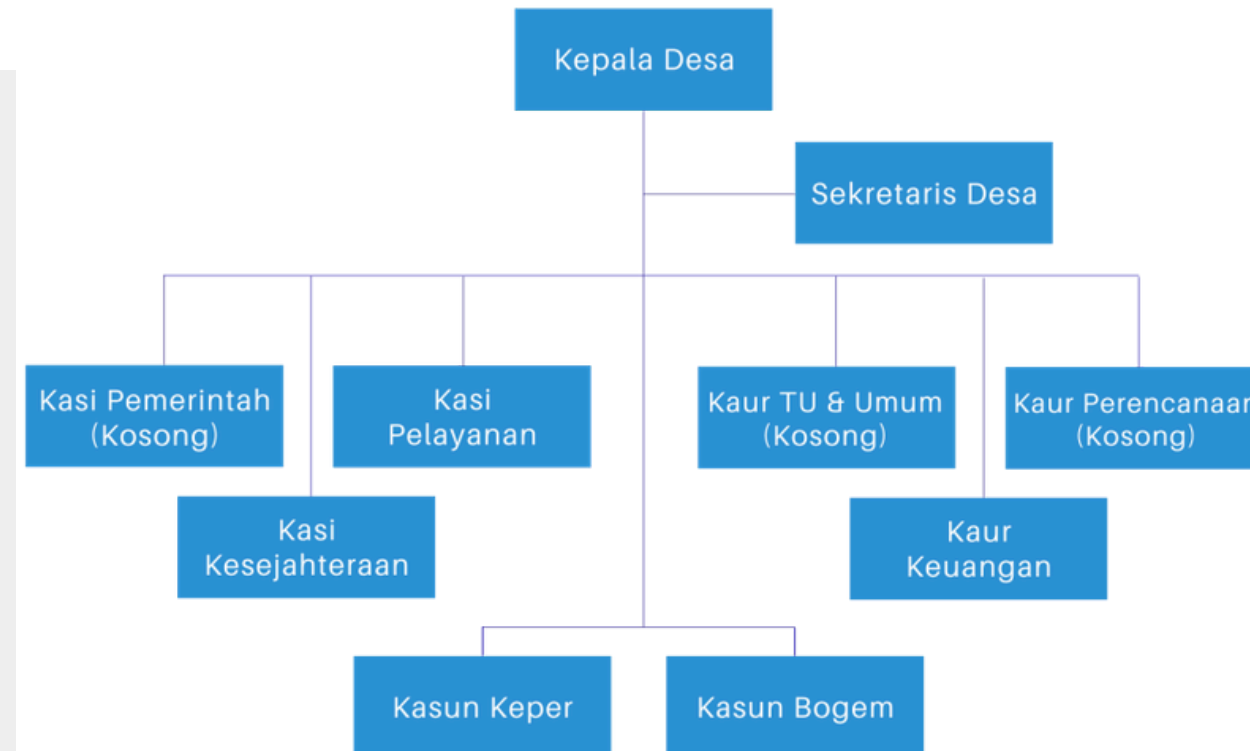
1. Pengumpulan data  
2. Reduksi Data  
3. Penyajian Data  
4. Penarikan Kesimpulan

# Hasil dan Pembahasan

## 1 Organisasi

Implementasi Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper belum didukung struktur organisasi yang ideal akibat kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan, sehingga pengelolaan aplikasi dialihkan kepada Kasi Pelayanan dan terjadi pelaksanaan tugas di luar tupoksi. Pengoperasian aplikasi dilakukan oleh satu orang operator yang telah mengikuti sosialisasi dan mampu beradaptasi dengan teknologi, namun masih memerlukan pendampingan lanjutan. Sarana dan prasarana pendukung telah tersedia dan cukup memadai, sehingga kendala utama implementasi lebih disebabkan oleh aspek organisasi dan sumber daya manusia.

**Gambar 1.** Struktur Organisasi Pemerintah Desa Keper



Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.

**Tabel 3.** Pelaksana Aplikasi Indeks Desa

Nama	Pendidikan Terakhir	Jumlah Desa	Bimtek
Suci Isnaini, S.H	S1	Kasi Pelayanan sekaligus Operator Indeks Desa	Sosialisasi dan teknik percepatan kegiatan pendataan tahun 2025

**Tabel 4.** Sarana Prasarana Penunjang Keberhasilan Aplikasi Indeks Desa

Sarana/Prasarana	Spesifikasi
Laptop	Lenovo 81WH
Wi-Fi	Indihome 50 Mbps
Printer	Epson L310
Printer/Scanner	Brother DCP-L25400W

Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.

# Hasil dan Pembahasan

## 2 Interpretasi

Indikator interpretasi menunjukkan bahwa pemahaman perangkat Desa Keper terhadap kebijakan Indeks Desa masih dipengaruhi oleh perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa yang membawa dimensi, indikator, serta mekanisme penilaian baru. Meskipun operator telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh DPMD Kab. Sidoarjo dan Pemerintah Kec. Krembung dalam praktiknya masih terdapat kesulitan dalam menafsirkan seluruh indikator, sehingga pelaksanaan cenderung berorientasi pada pencapaian nilai desa mandiri daripada menggambarkan kondisi pembangunan desa yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa interpretasi kebijakan masih perlu diperkuat agar Indeks Desa berfungsi sebagai alat evaluasi dan monitoring pembangunan desa secara objektif.

Gambar 2. Sosialisasi Indeks Desa



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Keper.

Tabel 5. Pelaksana Aplikasi Indeks Desa

Hari/Tanggal	Tempat	Materi Sosialisasi	Keterangan
Rabu, 19 April 2025	Ruang Rapat. Lt. 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan Indeks Desa 2025.	Tidak Hadir
Rabu, 7 Mei 2025	Vila Pemda Sidoarjo Delta Loka, Pasuruan	Sosialisasi dan teknik percepatan kegiatan pendataan tahun 2025	Hadir

Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.

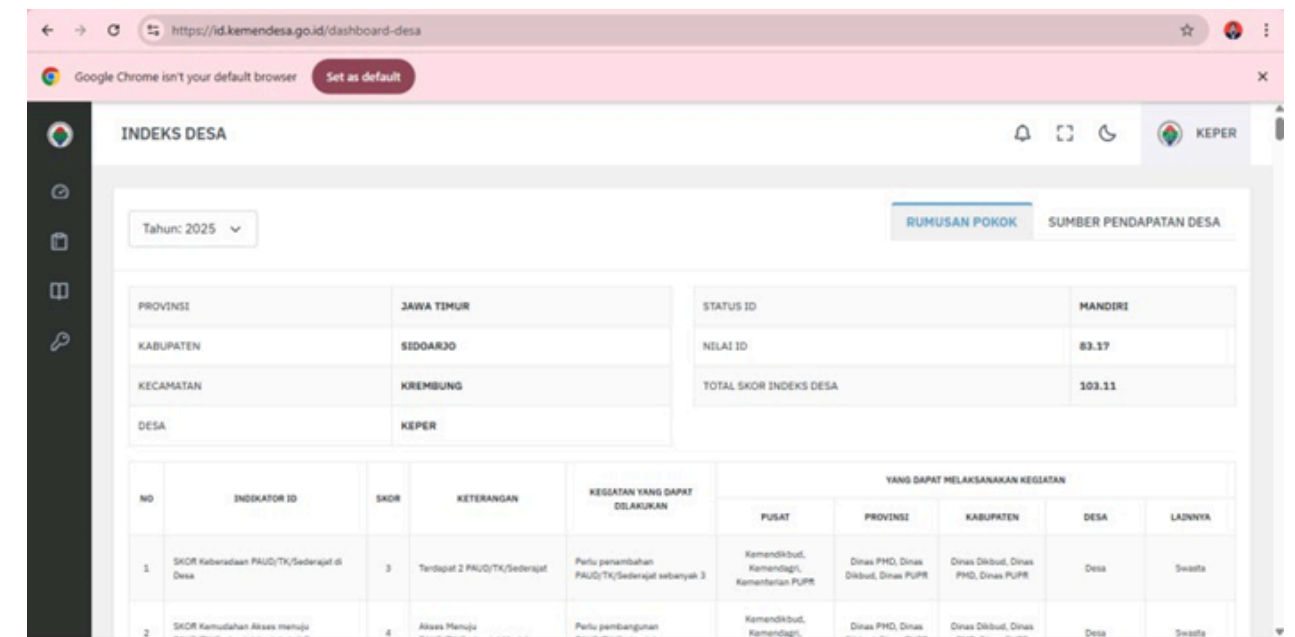
# Hasil dan Pembahasan

## 3 Aplikasi

Implementasi Indeks Desa di Desa Keper dilaksanakan sesuai tahapan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan melalui identifikasi isu dan penyusunan instrumen kuesioner, tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan, penginputan, serta pembahasan data melalui musyawarah desa yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan provinsi, sedangkan tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menilai pelaksanaan serta hasil pendataan Indeks Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, menghadapi kendala antara lain tidak ditampilkannya kembali data dan skor yang telah diinput setelah proses verifikasi oleh pihak provinsi sehingga operator desa tidak dapat melihat capaian indikator sebelumnya sebagai acuan evaluasi. Selain itu, sistem aplikasi juga tidak menampilkan informasi batas waktu (deadline) pengisian data secara jelas serta sering mengalami gangguan akses seperti loading lambat atau error ketika mendekati tenggat pengumpulan akibat tingginya jumlah pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan operator desa harus melakukan penginputan ulang data dan mencoba akses sistem secara berulang saat terjadi gangguan

Gambar 3. Tampilan Hasil Indeks Desa Keper

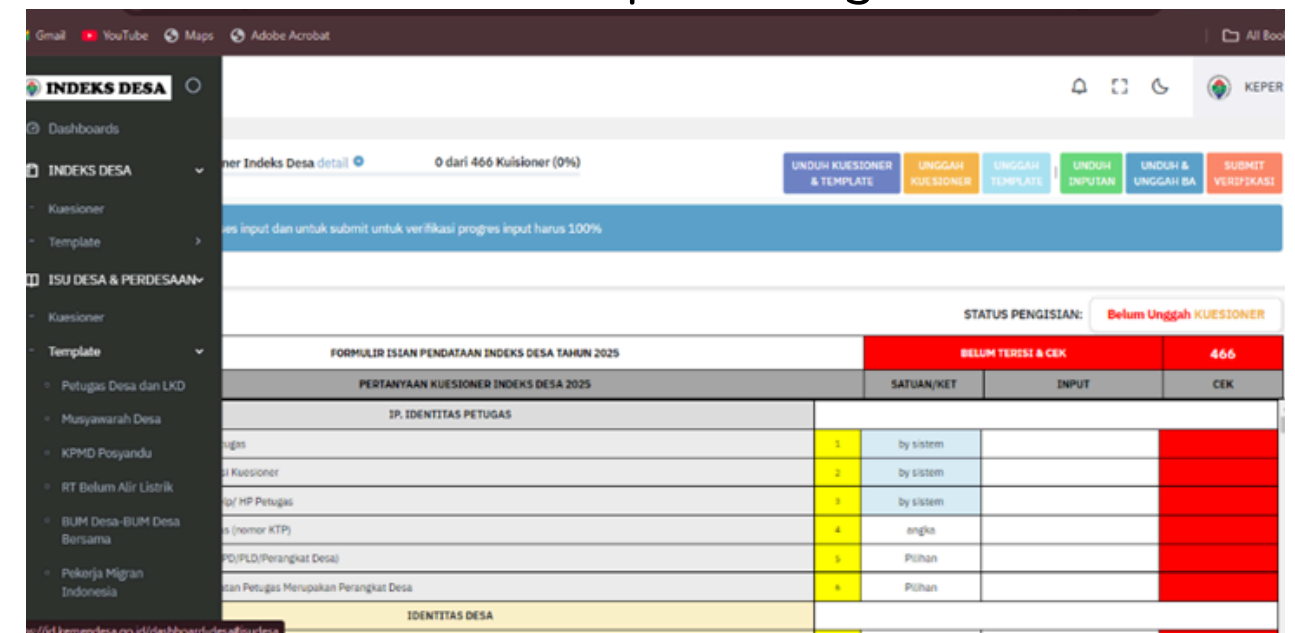


The screenshot shows the 'INDEKS DESA' dashboard with the following details:

- Year: 2025
- Location: PROVINSI: JAWA TIMUR, KABUPATEN: SIDOARJO, KECAMATAN: KREMBUNG, DESA: KEPER
- Status: STATUS ID: MANDIRI, NILAI ID: 83.37, TOTAL SKOR INDEKS DESA: 303.11
- Table of Indicators:

NO	INDIKATOR ID	SKOR	KETERANGAN	KESSITAN YANG DAPAT DELAKUKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN				
					PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	LAINNYA
1	SKOR Ketersediaan PRG/TK/Selengkap di Desa	3	Terdapat 2 PRG/TK/Selengkap	Perlu penambahan PRG/TK/Selengkap sebanyak 3	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swaifa
2	SKOR Ketersediaan Akses menuju	4	Akses Menuju	Perlu pembangunan	Kemendikbud, Kemendagri	Dinas PMD, Dinas	Dinas Dikbud, Dinas	Desa	Swaifa

Gambar 4. Tampilan Sistem Ketika Data Harus Diinput Ulang



The screenshot shows the 'INDEKS DESA' dashboard with the following details:

- Progress: 0 dari 466 Kuesioner (0%)
- Status Pengisian: Belum Unggah KUESIONER
- Table of Questionnaire Status:

FORMULIR ISSAN PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025	SATUAN/KET	INPUT	CEK
PERTANYAAN KUESIONER INDEKS DESA 2025			
IDENTITAS DESA			
IP. IDENTITAS PETUGAS			
1. Kuesioner	5	by sistem	
2. Kuesioner	3	by sistem	
3. Kuesioner	3	by sistem	
4. Kuesioner	3	by sistem	
5. Kuesioner	3	by sistem	
6. Kuesioner	3	by sistem	
7. Kuesioner	3	by sistem	
8. Kuesioner	3	by sistem	
9. Kuesioner	3	by sistem	
10. Kuesioner	3	by sistem	
11. Kuesioner	3	by sistem	
12. Kuesioner	3	by sistem	
13. Kuesioner	3	by sistem	
14. Kuesioner	3	by sistem	
15. Kuesioner	3	by sistem	
16. Kuesioner	3	by sistem	
17. Kuesioner	3	by sistem	
18. Kuesioner	3	by sistem	
19. Kuesioner	3	by sistem	
20. Kuesioner	3	by sistem	
21. Kuesioner	3	by sistem	
22. Kuesioner	3	by sistem	
23. Kuesioner	3	by sistem	
24. Kuesioner	3	by sistem	
25. Kuesioner	3	by sistem	
26. Kuesioner	3	by sistem	
27. Kuesioner	3	by sistem	
28. Kuesioner	3	by sistem	
29. Kuesioner	3	by sistem	
30. Kuesioner	3	by sistem	
31. Kuesioner	3	by sistem	
32. Kuesioner	3	by sistem	
33. Kuesioner	3	by sistem	
34. Kuesioner	3	by sistem	
35. Kuesioner	3	by sistem	
36. Kuesioner	3	by sistem	
37. Kuesioner	3	by sistem	
38. Kuesioner	3	by sistem	
39. Kuesioner	3	by sistem	
40. Kuesioner	3	by sistem	
41. Kuesioner	3	by sistem	
42. Kuesioner	3	by sistem	
43. Kuesioner	3	by sistem	
44. Kuesioner	3	by sistem	
45. Kuesioner	3	by sistem	
46. Kuesioner	3	by sistem	
47. Kuesioner	3	by sistem	
48. Kuesioner	3	by sistem	
49. Kuesioner	3	by sistem	
50. Kuesioner	3	by sistem	
51. Kuesioner	3	by sistem	
52. Kuesioner	3	by sistem	
53. Kuesioner	3	by sistem	
54. Kuesioner	3	by sistem	
55. Kuesioner	3	by sistem	
56. Kuesioner	3	by sistem	
57. Kuesioner	3	by sistem	
58. Kuesioner	3	by sistem	
59. Kuesioner	3	by sistem	
60. Kuesioner	3	by sistem	
61. Kuesioner	3	by sistem	
62. Kuesioner	3	by sistem	
63. Kuesioner	3	by sistem	
64. Kuesioner	3	by sistem	
65. Kuesioner	3	by sistem	
66. Kuesioner	3	by sistem	
67. Kuesioner	3	by sistem	
68. Kuesioner	3	by sistem	
69. Kuesioner	3	by sistem	
70. Kuesioner	3	by sistem	
71. Kuesioner	3	by sistem	
72. Kuesioner	3	by sistem	
73. Kuesioner	3	by sistem	
74. Kuesioner	3	by sistem	
75. Kuesioner	3	by sistem	
76. Kuesioner	3	by sistem	
77. Kuesioner	3	by sistem	
78. Kuesioner	3	by sistem	
79. Kuesioner	3	by sistem	
80. Kuesioner	3	by sistem	
81. Kuesioner	3	by sistem	
82. Kuesioner	3	by sistem	
83. Kuesioner	3	by sistem	
84. Kuesioner	3	by sistem	
85. Kuesioner	3	by sistem	
86. Kuesioner	3	by sistem	
87. Kuesioner	3	by sistem	
88. Kuesioner	3	by sistem	
89. Kuesioner	3	by sistem	
90. Kuesioner	3	by sistem	
91. Kuesioner	3	by sistem	
92. Kuesioner	3	by sistem	
93. Kuesioner	3	by sistem	
94. Kuesioner	3	by sistem	
95. Kuesioner	3	by sistem	
96. Kuesioner	3	by sistem	
97. Kuesioner	3	by sistem	
98. Kuesioner	3	by sistem	
99. Kuesioner	3	by sistem	
100. Kuesioner	3	by sistem	

Sumberr: Indeks Desa Pemerintah Desa Keper

# Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Indeks Desa berbasis web di Desa Keper secara umum telah berjalan dan mampu mendukung kegiatan pendataan serta pemantauan pembangunan desa secara lebih terstruktur dan berbasis data. Hal ini terlihat dari keberhasilan desa mencapai nilai Indeks Desa sebesar 83,17 yang menempatkan Desa Keper pada kategori Desa Mandiri. Implementasi kebijakan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem digital serta sarana prasarana seperti laptop dan jaringan internet. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan yang menyebabkan pengelolaan aplikasi dialihkan kepada Kasi Pelayanan, keterbatasan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada operator desa, serta kendala teknis pada sistem aplikasi seperti tidak ditampilkannya kembali data setelah proses verifikasi dan gangguan akses server ketika mendekati batas waktu pengisian data. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun implementasi aplikasi telah berjalan dan memberikan hasil yang baik, masih diperlukan perbaikan pada aspek kelembagaan, pendampingan teknis, dan stabilitas sistem aplikasi agar pemanfaatannya dapat lebih optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan desa.

# Manfaat Penelitian

Memberikan pemahaman mengenai bagaimana implementasi aplikasi Indeks Desa berbasis web dalam kegiatan pendataan dan pemantauan pembangunan desa, sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data pembangunan desa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi dalam penggunaan aplikasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendampingan teknis, serta permasalahan sistem aplikasi, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan, meningkatkan kualitas sistem, serta memperkuat kapasitas aparatur desa agar pemanfaatan aplikasi Indeks Desa dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan desa yang berbasis data.

# Referensi

- [1] A. F. Indriani, “Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (Idm) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang,” vol. 10, no. 1, pp. 40–48, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa>
- [2] S. Setianingsih and I. Amarini, “Analisis Yuridis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara,” vol. 6, no. 2, pp. 452–462, 2023, doi: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1045>.
- [3] P. Kementerian Desa, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa,” 2024. [Online]. Available: <https://idm.kemendesa.go.id>
- [4] M. P. Y. Ahad and A. N. Barsei, “Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia,” J. Transform. Adm., pp. 52–74, 2023, doi: <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>.
- [5] A. N. Astika and N. S. Subawa, “Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun,” J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit. dan Hummanioramania, vol. 5, no. 2, p. 223, 2021, doi: [10.31604/jim.v5i2.2021.223-232](https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232).
- [6] D. Kementrian, Panduan Pengisian Kuesioner Indeks Desa 2025. 2025. [Online]. Available: <https://dpmg.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/sites/32/2025/04/SOP-Pendataan-Indeks-Desa-2025.pdf>
- [7] S. Y. Putri and I. F. Agustina, “Implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan,” Publikauma J. Adm. Publik ..., vol. 13, no. 2, pp. 1–13, 2025, doi: <https://doi.org/10.31289/publika.v13i1.14570>.
- [8] N. L. P. D. Maharani, I. D. A. P. Wirantari, and I. P. D. Yudartha, “Implementasi Aplikasi BUMDes-KU Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerta Sari Utama Desa Kesiman Kertalangu,” Socio-political Commun. Policy Rev., vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2025, doi: [10.61292/shkr.216](https://doi.org/10.61292/shkr.216).
- [9] A. R. Kumara, Metodologi Penelitian Kualitatif. 2018. [Online]. Available: <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/41924%0A>

# Referensi

- [10] M. R. Fadli, Memahami desain metode penelitian kualitatif, vol. 21, no. 1. 2021. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [11] C. O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto. 1996.
- [12] N. F. Rahman, B. Setiyono, and D. G. Manar, “Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Mewujudkan Smart Village (Desa Kalisidi Kabupaten Semarang),” *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 13, no. 1, pp. 15–30, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42068>
- [13] Q. Tsakila Harefa, V. Museliza, and R. Nurani, “Implementasi Penggunaan E-Office di Bappedalitbang Provinsi Riau: Analisis Model Charles O Jones,” *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 203–212, 2025, doi: 10.24036/jmiap.v7i2.1222.
- [14] S. Carrisa, S. A. Ganafiqih, J. Rahmawati, and I. Arisdiyoto, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik di Pos Lintas Batas Negara Aruk Kalimantan Barat,” *Dialogue J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 736–747, 2024.
- [15] D. Hertati, “Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahN desa di Kabupaten Sidoarjo,” *Din. Gov. J. Ilmu A Adm. Negara*, vol. 10, no. 1, 2020, doi: 10.33005/jdg.v10i1.2049.
- [16] Hartiningtyas and Choiriyah, “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *J. Publicuho*, vol. 7, no. 3, pp. 1558–1573, 2024, doi: 10.35817/publicuho.v7i3.517.
- [17] S. A. Prameisti, Wijayanto, and D. G. Manar, “Impementasi Kebijakan Pelayanan E-Ktp Berbasis Digital Melalui Lawet Kebumen Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023.,” *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 13, pp. 464–480, 2023.
- [18] P. Kementrian Desa, SOP Pendataan Indeks Desa 2025. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2025. [Online]. Available: <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/3/publikasi>
- [19] S. A. Izati and I. U. Choiriyah, “Implementation of Digital Employment Services Through the Sihubin Application at the Sidoarjo Manpower Office,” vol. 2, no. 2, pp. 2493–2505, 2025.

